

**PENERAPAN AKUNTANSI ASET TETAP BERDASARKAN PSAP 07  
PADA LAPORAN KEUANGAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  
DI WILAYAH JAWA TENGAH**

**Marliza Noor Hayatie**

**Abstrak:** Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menilai kesesuaian laporan finansial Departemen Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2019 dengan Standar Akuntansi Pemerintah Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua, terutama terkait dengan pencatatan akuntansi aset tetap sesuai PSAP 07. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengakuan aset tetap pada Departemen Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah terjadi pada saat barang diterima atau transaksi terjadi, dan telah dipresentasikan secara tepat dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, catatan mengenai masa manfaat aset tetap tidak memadai. Penggunaan metode akrual dalam laporan finansial Departemen Komunikasi dan Informatika secara umum sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Berbasis Akrua, terutama dalam hal akuntansi aset tetap sesuai PSAP 07.

**Kata kunci:** *aset tetap, pengakuan, pengungkapan, presentasi*

### **Latar Belakang**

Konteks terkini mengenai keterbukaan dan globalisasi memiliki pengaruh besar pada organisasi dalam menjelaskan tugas dan tanggung jawabnya kepada para pemangku kepentingan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Pemerintah, sebagai entitas terkait dengan penyajian laporan keuangan, memiliki kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan dengan tepat guna memastikan informasi yang dihasilkan relevan bagi pengguna laporan keuangan. Dalam rangka pemberdayaan wilayah, berbagai instansi ada untuk meningkatkan koordinasi tata kelola pemerintahan, layanan publik, dan keterlibatan masyarakat.

Secara umum, laporan keuangan dapat mencerminkan hasil dari aktivitas

keuangan yang dilakukan oleh suatu entitas dalam periode waktu tertentu (Hayatie et al., 2020). Laporan keuangan adalah *output* dari proses akuntansi yang melibatkan pencatatan dan perhitungan semua aktivitas keuangan perusahaan, dan laporan ini disediakan untuk pihak-pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi keuangan yang tersaji di dalamnya (Hayatie & Machfiroh, 2021).

Aktiva tetap adalah jenis aset fisik yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintahan atau oleh masyarakat dengan masa manfaat lebih dari 12 bulan. Jenis aset ini mencakup peralatan dan mesin, bangunan, serta struktur dengan masa manfaat terbatas, yang dapat digantikan dengan jenis aset tetap lain setelah masa manfaatnya berakhir. Penghitungan penyusutan biaya perolehan aset tetap

---

\*Politeknik Negeri Tanah Laut

Jl. Ahmad Yani No.Km.06, Pemuda, Kec. Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut

e-mail: [marliza@politla.ac.id](mailto:marliza@politla.ac.id)



diperlukan untuk menentukan berapa lama aset tersebut dapat bertahan atau dimiliki. Karena pentingnya aset tetap, sebuah instansi harus mencatat atau melaporkannya sebagai komponen penting dalam laporan keuangannya.

Signifikansi penyajian laporan keuangan perusahaan terletak pada kemampuannya untuk memberikan informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan dan digunakan sebagai alat untuk mendeteksi penyimpangan dalam penyajian laporan keuangan. Pengendalian internal diperlukan untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko kesalahan dalam penyajian laporan keuangan. Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, seperti SAP No. 71, mengatur pengendalian internal, terutama dalam konteks akuntansi aset tetap.

Pengakuan aset tetap berbasis akrual mengacu pada pengakuan langsung aset tetap saat barang telah diterima atau transaksi telah terjadi. Karena jumlah biaya yang diperlukan untuk memperoleh aset tetap cukup besar, sebuah instansi perlu menerapkan perlakuan akuntansi yang benar dalam pengelolaan aset tetap. Aset tetap umumnya memiliki nilai yang besar, sehingga memerlukan perlakuan khusus dalam penyajian laporan keuangan. Namun, seringkali muncul permasalahan terkait pelaporan aset tetap terutama dalam hal kepatuhan terhadap SAP PP No. 71 Tahun 2010 mengenai aset tetap dan pelaporan keuangan yang sesuai.

Tipan et al. (2016) melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. Hasil penelitian mereka dipresentasikan melalui beberapa tabel perbandingan mengenai perlakuan

akuntansi aset tetap di Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 tentang Aset Tetap.

Selain itu, Masipaung et al. (2015) juga melakukan analisis mengenai perlakuan akuntansi aset tetap di Badan Kepegawaian dan Pendidikan serta Pelatihan Kota Manado. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinas Kepegawaian dan Pendidikan serta Diklat Kota Manado telah menerapkan perlakuan yang sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku terkait pengungkapan aset tetap.

Rohendi & Saadah (2017) juga melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah (PSAP) Nomor 07 di Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung telah mengimplementasikan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07 dengan baik dalam semua aspek, mulai dari pengakuan aset tetap, pengukuran, penilaian awal, pencairan setelah akuisisi, pengukuran selanjutnya, pengakuan awal, pelepasan, dan pelepasan aset tetap.

Astria (2017) juga melakukan analisis terhadap perlakuan akuntansi aset tetap di RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa RSUD Dr. Soeratno telah mendekati Standar Akuntansi Keuangan dalam perlakuan akuntansi aset tetap. Meskipun demikian, masih terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan PSAK Nomor 16 dan PSAP Nomor 07.

Selanjutnya, Panjaitan (2018) juga melakukan pencatatan aset tetap di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara. Hasil penelitian ini mencakup pengumpulan data mengenai subjek penelitian untuk memahami permasalahan yang berkaitan dengan pelaporan aset tetap di Dinas Investasi dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara.

Tujuan dari penelitian yang dilakukan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah adalah untuk mengevaluasi kesesuaian perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh instansi ini dengan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07.

## Studi Literatur

### Konsep Dasar Akuntansi

Akuntansi dapat dijelaskan sebagai layanan yang meliputi pencatatan, penjelasan, serta pelaporan transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang penting bagi para pengambil keputusan. Informasi finansial ini berguna bagi pihak lain dalam menganalisis dan merencanakan kebijakan terkait aktivitas ekonomi (Sujarweni & Wiratna, 2015).

Akuntansi adalah aktivitas yang melibatkan proses pencatatan, klasifikasi, ringkasan, dan pelaporan data kuantitatif yang berkaitan dengan keuangan entitas, dengan memanfaatkan seni penulisan (Hayatie & Machfiroh, 2021).

### Akuntansi di Sektor Publik

Akuntansi di Sektor Publik melibatkan proses pencatatan, pengelompokan, dan pelaporan transaksi ekonomi untuk menghasilkan informasi keuangan yang diperlukan oleh pihak lain untuk membuat kebijakan terkait

pengelolaan dana publik di lembaga dan departemen tinggi pemerintah. Definisi ini menegaskan bahwa akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam menyediakan informasi keuangan yang akurat dan berkualitas untuk mendukung pengambilan keputusan yang tepat dalam pengelolaan dana publik (Muindro, 2012).

### Akuntansi Pemerintahan

Pada esensinya, akuntansi pemerintahan adalah penerapan akuntansi di ranah keuangan publik, terutama pada tahap pelaksanaan anggaran, yang meliputi segala sesuatu, baik sementara maupun permanen, di semua unit dan tingkatan pemerintahan. Ada tuntutan yang tinggi akan transparansi dan akuntabilitas publik terkait penggunaan akuntansi dalam pencatatan dan pelaporan kinerja pemerintah (Dedi & Wiratna, 2012).

### Akuntansi untuk Aset Tetap

Dewan Standar Akuntansi Keuangan (IASB) mendefinisikan aset sebagai potensi manfaat ekonomi yang akan diperoleh oleh entitas di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masa lalu. Hal ini menunjukkan bahwa akuntansi adalah suatu sistem informasi yang meliputi proses identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi ekonomi serta menyampaikan hasilnya dalam bentuk laporan keuangan untuk dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan (Harahap, 2011).

### Klasifikasi Aset Tetap

Menurut Peraturan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 07, aset tetap terbagi menjadi beberapa kelompok. Pertama, terdapat kelompok tanah yang didefinisikan sebagai tanah yang diperuntukkan untuk operasional pemerintah dan siap digunakan.

Kedua, peralatan dan mesin termasuk kendaraan bermotor, peralatan elektronik, dan inventaris kantor yang memiliki nilai signifikan dan masa manfaat lebih dari 12 bulan, serta siap digunakan. Selain itu, ada kelompok bangunan dan struktur yang mencakup semua bangunan dan struktur yang dimiliki dan siap digunakan. Ketiga, terdapat kelompok jalan, irigasi, dan jaringan yang mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun dan dimiliki atau dikuasai oleh pemerintah dan siap digunakan. Terakhir, ada kelompok aset tetap lainnya yang meliputi aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap sebelumnya, diperoleh dan digunakan untuk operasi pemerintah, serta siap digunakan.

#### **Pengakuan Aset Tetap**

Berdasarkan PSAP No. 07 pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, aktiva tetap dapat diakui jika memenuhi persyaratan bahwa manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur secara andal. Aset hanya diakui apabila memenuhi kriteria berikut: berwujud, memiliki masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya dapat diukur secara andal, dan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas.

#### **Pengukuran Biaya Perolehan**

Juan & Wahyuni (2012) mengutip PSAP No.07 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa biaya awal perolehan aset tetap terdiri dari beberapa komponen, yaitu harga perolehan, biaya yang secara langsung dapat diatribusikan untuk memindahkan aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan, serta perkiraan biaya pembongkaran dan relokasi aset serta pemulihan lokasi. Biaya

imbalance kerja yang timbul langsung dari pembangunan atau perolehan aset tetap dan biaya penyiapan lahan juga dapat diatribusikan langsung dalam PSAP No. 7. Selain itu, biaya pengujian aset untuk menentukan apakah aset berfungsi dengan baik juga dapat dihitung dalam biaya awal, setelah dikurangi hasil bersih dari penjualan produk yang dihasilkan sehubungan dengan pengujian. Oleh karena itu, biaya awal aset tetap harus diukur dengan andal sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Elemen-elemen biaya aset tetap yaitu: tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi, dan aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang berlangsung.

#### **Pengeluaran Setelah Perolehan Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07, biaya yang timbul setelah perolehan aset tetap dapat dikelompokkan menjadi dua jenis. Pertama, pengeluaran setelah perolehan aset tetap. Kedua, biaya yang meningkatkan masa manfaat atau memberikan manfaat ekonomi di masa mendatang, seperti peningkatan kapasitas, kualitas produksi, atau standar kinerja.

#### **Penurunan Nilai Aset Tetap**

Menurut PSAP No. 07 Ayat 53, penyusutan adalah proses alokasi sistematis nilai aset tetap yang dapat disusutkan selama masa manfaat aset tersebut. Semua aset tetap, kecuali tanah, akan mengalami penyusutan nilai manfaat. Tindakan ini dilakukan untuk memastikan bahwa nilai tercatat dari aset tetap tidak lagi mencerminkan nilai manfaat yang dimilikinya. Selain teknik alokasi, PSAP No. 07 Paragraf 53 juga memaparkan tentang kerusakan.

### **Pengakuan Aset Tetap**

Sesuai PSAP No. 07 mengindikasikan bahwa aset tetap tidak diakui (paragraf 77): (1) ketika dirilis atau; (2) ketika tidak ada manfaat ekonomi di masa depan yang diantisipasi dari penggunaannya

### **Penyajian dan Pengungkapan Aset Tetap**

Dalam konteks penyingkapan laporan keuangan, prinsip informasi mengharuskan penyingkapan yang memadai dan komprehensif, kecuali ada kebijakan lain yang ditetapkan oleh auditor. Tujuannya adalah agar laporan keuangan dapat memberikan informasi yang memadai dan lengkap bagi pengguna. Laporan keuangan yang lengkap terdiri dari elemen-elemen berikut: Neraca, Laporan laba rugi, Pernyataan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan (Harahap, 2011).

### **Prinsip Akuntansi Berbasis Akrual**

Pasal 32 Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, bersama dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan, menegaskan bahwa laporan keuangan yang disiapkan untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBN/APBD harus mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan. PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menggantikan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan menetapkan format dan struktur laporan keuangan yang harus dipatuhi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disarikan bahwa memiliki sistem akuntansi yang efisien dalam pemerintahan sangatlah vital untuk memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung transparansi

dan akuntabilitas pemerintah, terutama berkaitan dengan aset. Oleh karena itu, pemerintah harus memberikan transparansi kepada masyarakat untuk membangun kepercayaan dan memperkuat pemahaman masyarakat terhadap program-program yang dijalankan pemerintah. Keterbukaan mengenai kekayaan negara harus disampaikan kepada masyarakat sebagai alat pelayanan atau sumber informasi bagi masyarakat. Hal ini dapat dicapai dengan menerapkan sistem transparansi yang efektif dalam mengelola aset negara dan menyajikan data secara terbuka kepada masyarakat.

### **Metode Penelitian**

Data yang dipakai dalam penelitian ini merupakan data yang memiliki sifat kuantitatif. Data dengan karakteristik kuantitatif ini merupakan laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah pada periode 2018-2019.

Sumber dari mana penulis memperoleh data untuk penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder ini diambil dari portal resmi Kantor Komunikasi dan Informatika (<http://ppid.diskominfo.jatengprov.go.id>).

Peneliti menerapkan metode dokumentasi serta kajian pustaka guna mengumpulkan data yang diperlukan untuk menganalisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap dengan Pendekatan Akrual dalam Laporan Keuangan Kantor Komunikasi dan Informatika. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui analisis dokumen yang relevan dan telaah sumber bacaan terkait dengan fokus penelitian.

Dalam tahap analisis, pengolahan, dan evaluasi data, penulis menerapkan teknik kuantitatif. Teknik analisis

kuantitatif digunakan untuk mengelola data yang berbentuk angka-angka yang diambil dari data operasional dan laporan keuangan Departemen Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah selama periode 2018-2019.

### Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengakuan Aset Tetap

Pernyataan & Pemerintah (2005) mengartikan aset tetap sebagai aset dengan wujud fisik yang digunakan untuk menunjang kegiatan pemerintah atau digunakan oleh masyarakat secara umum dan memiliki masa manfaat ekonomi lebih dari dua belas bulan atau satu periode akuntansi. Aset tetap ini diperoleh atau dibangun untuk digunakan, bukan untuk dijual kembali. Pengenalan aset tetap memiliki signifikansi yang besar dalam memastikan bahwa nilai aset tersebut tercermin dengan baik dalam laporan keuangan perusahaan.

### Penilaian Awal Aset Tetap

Umumnya, aset tetap yang dibeli diukur berdasarkan biaya total yang mencakup biaya langsung dan tidak langsung yang dikeluarkan untuk memperolehnya

Pernyataan & Pemerintah (2005). Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Komunikasi dan Informatika 2018-2019 mencatat biaya pembelian langsung yang dapat dijadikan sebagai dasar perhitungan biaya perolehan aset tetap. Informasi terkait dapat ditemukan di Tabel 1 dan Tabel 2.

### Pengeluaran setelah Aset Tetap

Pengeluaran yang terjadi setelah perolehan aset tetap dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yakni pengeluaran untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap Pernyataan & Pemerintah (2005). Dalam laporan keuangan Departemen Komunikasi dan Informatika per 31 Desember 2018, biaya pemeliharaan aset mencapai Rp 1.532.539.747. Rincian biaya tersebut meliputi pemeliharaan kendaraan bermotor sebesar Rp 328.334.247 dan pemeliharaan lainnya sebesar Rp 1.204.205.500. Sementara pada periode berikutnya, yaitu per 31 Desember 2019, biaya pemeliharaan aset mencapai Rp 1.205.814.025 dengan rincian biaya perawatan kendaraan bermotor sekitar Rp 326.725.772 dan pemeliharaan lainnya sekitar Rp 879.088.253.

**Tabel 1. Sewa dan Belanja Modal 2018**

Deskripsi	2018		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Ruko Sewa Barang Rumah/Gedung/Gudang	1.689.040.000	1.647.870.000	97,56
Belanja perlengkapan kantor dan penyewaan peralatan	152.520.000	152.520.000	100
Belanja modal untuk peralatan dan mesin	17.314.307.000	16.719.786.900	97,05
Belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.500.000	84.250.000	98,54

Sumber: data diolah 2020

**Tabel 2. Sewa dan Belanja Modal 2019**

Deskripsi	2019		
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Ruko Sewa Barang Rumah/Gedung/Gudang	1.118.400.000	1.108.577.500	99,12
Belanja perlengkapan dan penyewaan peralatan kantor	135.560.000	131.560.000	99,25
Belanja modal untuk peralatan dan mesin	21.330.796.000	19.541.300.000	92,08

Sumber: data diolah 2020

### Pengungkapan Aset Tetap

Dalam mengungkapkan aset tetap yang dimiliki oleh Layanan Komunikasi dan Informasi, terdapat kategori-kategori tertentu yang digunakan untuk mengklasifikasikan aset tersebut. Aset yang dimiliki atau diperoleh harus memberikan manfaat ekonomi bagi entitas dan mendukung kegiatan masyarakat dalam operasional pemerintah daerah yang dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Tujuan dari pengungkapan aset tetap ini adalah untuk menjelaskan informasi penting yang terkandung dalam Neraca Departemen Komunikasi dan Informasi untuk periode 2018-2019. Aset tetap ini meliputi kategori seperti tanah, peralatan dan mesin, bangunan dan struktur, jalan, irigasi, jaringan, aset tetap lainnya, dan konstruksi yang sedang dalam proses. Kantor Komunikasi dan Informatika telah

mencatat Laporan Keuangan yang mengungkapkan saldo aset tetap per 31 Desember 2018 dan 2017, serta saldo tetap per 31 Desember 2019 dan 2018. Informasi terkait dapat ditemukan di Tabel 3 dan Tabel 4.

### Penyajian Aset Tetap

Bagian ini merujuk pada ketentuan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) 07 yang menekankan perlunya melaporkan aset tetap dengan biaya setelah dikurangi akumulasi penyusutan. Lebih lanjut, sesuai dengan Pernyataan & Pemerintah, (2005) paragraf 58, seluruh jenis aset tetap kecuali tanah dan konstruksi yang masih dalam proses harus mengalami penyusutan sesuai dengan sifat dan karakteristik masing-masing. Informasi mengenai saldo aset tetap dapat ditemukan di Tabel 5 dan Tabel 6.

**Tabel 3. Saldo aktiva tetap per 31 desember 2018 – 2017.**

<i>Deskripsi</i>	<i>31 Desember 2018 (Rp)</i>	<i>31 Desember 2017 (Rp)</i>
Tanah	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
Peralatan dan Mesin	42.651.392.545,00	27.711.952.818,00
Bangunan dan Bangunan	5.399.898.874,00	5.399.898.874,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	463.645.400,00	379.395.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi sedang berlangsung	-	98.736.000,00
Akumulasi penyusutan aset tetap	-28.880.003.328,27	-24.839.312.815,01
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>26.661.933.490,73</b>	<b>15.727.670.276,99</b>

Sumber: CaLK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tabel 4. Saldo aktiva tetap per 31 desember 2018 – 2017.

**Tabel 4. Saldo aktiva tetap per 31 desember 2019 – 2018.**

<i>Uraian</i>	<i>31 Desember 2019 (Rp)</i>	<i>31 Desember 2018 (Rp)</i>
Tanah	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
Peralatan dan Mesin	61.891.181.207,00	42.651.392.545,00
Bangunan dan Bangunan	5.442.697.874,00	5.399.898.874,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	463.645.400,00	463.645.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi sedang berlangsung	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	-39.102.872.999,37	-28.880.003.328,27
<b>JUMLAH ASET TETAP</b>	<b>35.671.651.481,63</b>	<b>26.611.933.490,73</b>

Sumber: CaLK Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tabel 4. Saldo aktiva tetap per 31 desember 2019 – 2018

Situs Jurnal : <http://ejournal.stiepancasetia.ac.id/index.php/jieb>

Jilid 9 Nomor 3 November 2023

Hal 335 - 345

Tabel 5. Neraca Layanan Komunikasi Dan Informatika Per 31 Desember 2018

DESKRIPSI	2018 (Rp)	2017 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>38.283.700,00</b>	<b>28.926.500,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>		
<b>AKTIVA</b>		
Tanah	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
Peralatan dan Mesin	42.651.392.545,00	27.711.952.818,00
Bangunan dan Bangunan	5.399.898.874,00	5.399.898.874,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	463.645.400,00	379.395.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi sedang berlangsung	-	98.736.000
Akumulasi penyusutan aset tetap	(28.880.003.328,27)	(24.839.312.815,01)
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>26.611.933.490,73</b>	<b>15.727.670.276,99</b>
<b>DANA CADANGAN</b>		
<b>ASET LAINNYA</b>	793.037.287,80	96.482.400,00
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>793.037.287,80</b>	<b>96.482.400,00</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>27.443.254.478,53</b>	<b>16.721.420.776,99</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>EKUITAS</b>	27.443.254.478,53	16.721.420.776,99
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>27.443.254.478,53</b>	<b>16.721.420.776,99</b>

Tabel 6. Neraca Layanan Komunikasi Dan Informatika Per 31 Desember 2019.

DESKRIPSI	2019 (Rp)	2018 (Rp)
<b>ASET</b>		
<b>ASET LANCAR</b>	<b>841.000,00</b>	<b>38.283.700,00</b>
<b>INVESTASI JANGKA PANJANG</b>	-	-
<b>AKTIVA</b>		
Tanah	6.977.000.000,00	6.977.000.000,00
Peralatan dan Mesin	61.891.181.207,00	42.651.392.545,00
Bangunan dan Bangunan	5.442.697.874,00	5.399.898.874,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	463.645.400,00	463.645.400,00
Aset Tetap Lainnya	-	-
Konstruksi sedang berlangsung	-	-
Akumulasi penyusutan aset tetap	(39.102.872.999,37)	(28.880.003.328,27)
<b>TOTAL ASET TETAP</b>	<b>35.671.651.481,63</b>	<b>26.611.933.490,73</b>
<b>DANA CADANGAN</b>	841.757.950,00	793.037.287,80
<b>ASET LAINNYA</b>		
<b>TOTAL ASET LAINNYA</b>	<b>841.757.950,00</b>	<b>793.037.287,80</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>36.514.250.431,63</b>	<b>27.443.254.478,53</b>
<b>KEWAJIBAN</b>		
<b>EKUITAS</b>		
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS DANA</b>	<b>36.514.250.431,63</b>	<b>27.443.254.478,53</b>

Sumber: data diolah (2020)





Dalam laporan keuangan, akumulasi penyusutan terkait dengan nilai negatif yang berperan dalam mengurangi total nilai aset tetap. Ini terkait dengan pos akun aset tetap, yaitu Belanja Modal yang tercatat dalam Laporan Realisasi Anggaran periode 2018-2019, dan juga akun beban yang tercatat dalam Laporan Operasional pada periode yang sama. Informasi Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja dapat dilihat pada Tabel 7 dan Tabel 8.

### **Analisis penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual dalam penyajian laporan keuangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah.**

Dinas Komunikasi dan Informatika telah mematuhi Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 dalam mengelola akuntansi aset tetap. Hal ini tercermin dalam Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Komunikasi Informatika yang menjelaskan bahwa pencatatan dalam laporan keuangan mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.

Di Kantor Komunikasi dan Informatika, aset tetap diakui dengan mencatat biaya akuisisinya. Informasi rinci tentang aset tetap diperoleh dari berbagai laporan keuangan, termasuk Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Catatan atas Laporan Keuangan, Neraca, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Pada awalnya, pengukuran aset tetap dicatat sebagai biaya, sementara akuisisi aset tetap dari pembelian dicatat sebagai biaya.

**Tabel 7. Pendapatan dan Belanja per 31 desember 2018 dan 2017.**

<i>Deskripsi</i>	<i>Anggaran 2018</i>	<i>Realisasi 2018</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2017</i>
<b>Belanja Modal</b>				
Pembelian Tanah	-	-		-
Peralatan dan Mesin Belanja	17.228.807.000,00	16.719.786.900,00	97,05	3.236.204.100,00
Belanja Gedung dan Bangunan	-	-		154.673.000,00
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan	85.500.000,00	84.250.000,00	98,54	-
Membeli aset tetap lainnya	-	-		-
Belanja Aset Tidak Berwujud	-	-		-
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>	<b>17.314.307.000,00</b>	<b>16.804.036.900,00</b>	<b>97,05</b>	<b>3.390.877.100,00</b>

Sumber: Unit Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah

**Tabel 8. Pendapatan dan Belanja per 31 desember 2019 dan 2018.**

<i>Deskripsi</i>	<i>Anggaran 2019</i>	<i>Realisasi 2019</i>	<i>%</i>	<i>Realisasi 2018</i>
<b>Belanja Modal</b>				
Pembelian Tanah		-		-
Peralatan dan Mesin Belanja	21.330.769.000	19.641.300.000	92,08	16.719.786.900
Belanja Gedung dan Bangunan		-		-
Belanja Jalan, Irigasi, dan Jaringan		-		-
Membeli aset tetap lainnya		-		84.250.000
Belanja Aset Tidak Berwujud	409.980.000	402.891.000	98,27	-
<b>TOTAL BELANJA MODAL</b>	<b>21.740.749.000</b>	<b>20.044.191.000</b>	<b>92,20</b>	<b>16.804.036.900</b>

Sumber: Unit Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informasi Provinsi Jawa Tengah



Pengungkapan dan penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Kantor Komunikasi dan Informatika telah sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku sejak tahun 2005 terkait klasifikasi dan penyajian akuntansi aset tetap. Dalam penyajian aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika, aset tetap dibagi secara terperinci berdasarkan jenisnya, termasuk Tanah, Peralatan dan Mesin, Bangunan dan Struktur, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi dalam Proses, dan Akumulasi Penyusutan Aset tetap. Dalam neraca, aset tetap disajikan dengan nilai biaya dikurangi akumulasi penyusutan, kecuali untuk Tanah dan Konstruksi yang sedang berlangsung.

### Kesimpulan

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2019 telah mengakui nilai aset tetap berdasarkan biaya perolehan yang diperoleh dari pembelian aset tersebut. Dalam pengakuan awal, nilai perolehan aset tetap ditetapkan sebagai belanja modal yang mencerminkan total pengeluaran yang diperlukan untuk memperoleh barang. Pengeluaran untuk pemeliharaan aset tetap tidak bertujuan untuk meningkatkan nilai aset tetap, melainkan dicatat sebagai biaya pemeliharaan aset tetap, sesuai dengan prinsip pengakuan aset tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.

Laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2019 telah mematuhi persyaratan Standar Akuntansi

Pemerintahan No. 07 dan Peraturan Pemerintah No. 71 yang berlaku. Namun, terdapat ketidaksesuaian dalam pengungkapan informasi aset tetap, yaitu tidak disebutkan masa manfaat aset tetap yang dimiliki oleh entitas.

Pengungkapan aset tetap dalam laporan keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan No. 07 dan Peraturan Pemerintah No. 71. Seluruh informasi terkait penyajian aset tetap telah diungkapkan melalui laporan saldo, laporan realisasi anggaran, dan laporan operasional yang digunakan dalam pelaporan aset tetap di Jawa Tengah.

Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2019 telah menerapkan metode akuntansi akrual sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010.

### DAFTAR PUSTAKA

- Astria, I. (2017). *Analisis perlakuan akuntansi aset tetap pada RSUD Dr. Soeratno Gemolong Sragen*.
- Dedi, & Wiratna. (2012). *Akuntansi sektor publik. Pengertian akuntansi pemerintah*. Pustaka Baru Press.
- Harahap, S. S. (2011). *Analisis Kritis Atas Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Hayatie, M. N., Alam Sur, W. A., & Gautama, M. S. (2020). Dampak Aspek Capital, Assets, Earning, dan Liquidity Pada Kesehatan Keuangan Perbankan. *Jurnal SEKURITAS (Saham, Ekonomi, Keuangan Dan Investasi)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.32493/skt.v4i1.5659>



- Hayatie, M. N., & Machfiroh, I. S. (2021). Evaluasi prestasi kerja perusahaan dengan metode analisis rasio laporan arus kas pada pt. Indosat Tbk. *Jurnal Ecoment Global*, 6(2), 151–160.
- Juan, N. E., & Wahyuni, E. T. (2012). Panduan Praktis Standar Akuntansi Keuangan. *Edisi Kedua*. Jakarta: Salemba Empat.
- Masipaung, Y., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Badan Kepegawaian dan Diklat (BKD) Kota Manado. *E-Journal Unsrat, Fakultas E*.
- Muindro, R. (2012). *Akuntansi sektor publik organisasi non laba* (3rd ed.). Mitra Wacana Media.
- Panjaitan, S. (2018). *Akuntansi aset tetap pada Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sumatera Utara*.
- Pernyataan, & Pemerintah, S. A. (2005). Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Pernyataan Nomor 7 Tentang Akuntansi Aset Tetap. *PSAP 07 Tentang Aset Tetap*, 07, 1–14.
- Rohendi, H., & Saadah, K. (2017). Analisis perlakuan akuntansi atas aset tetap berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) No. 07 pada Rumah Sakit Mata Cicendo Bandung Forum Keuangan dan Bisnis Indonesia (FKBI). 6, 31–54.
- Sujarweni, & Wiratna. (2015). *Akuntansi Sektor Publik*. Pustaka Baru Press.
- Tipan, A., Saerang, D., Lambey, E. P., Rohendi, H., & Saadah, K. (2016). Analisis Perlakuan Akuntansi Aset Tetap Pada Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Sulawesi Utara. *E-Journal Unsrat, Fakultas E*.